▸ PENGUNGKAPAN KASUS *SKIMMING*

Antara/ Reno Esnir

Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Nico Afinta (*kiri*) bersama Kabid Humas Kombes Pol Argo Yuwono memperlihatkan sejumlah barang bukti saat rilis pengungkapan tindak pidana pencurian data elektronik (*skimming*) dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh WNA, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (3/4). Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengungkap tiga kasus pencurian data elektronik atau *skimming* yang dilakukan empat WNA jaringan internasional dengan korban bank swasta.

▸ EKSPANSI BISNIS

Peruri Jajal Bisnis Percetakan Kartu

JAKARTA — Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) merealisasikan tahap awal strategi untuk masuk lebih dalam ke bisnis percetakan kartu pintar atau *smart card,* dengan mengakuisisi perusahaan yang bergerak di sektor tersebut.

Melalui anak usahanya yakni PT Peruri Digital Security resmi mengakuisisi 55% saham PT Cardsindo Tiga Perkasa dengan nilai transaksi Rp35,3 miliar.

Cardsindo merupakan anak perusahaan dari PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. yang didirikan pada 2012 dan bergerak di bidang bisnis *smart card* dan kartu plastik yang memiliki beberapa fitur sekuriti digital.

Dwina S. Wijaya, Direktur Utama Perum Peruri, mengatakan bahwa kunci daya saing Cardsindo terletak dalam kemampuan memproduksi beberapa produk *smart card* seperti *contactless,* RFID *cards, contact smart cards,* PVC *cards* dan produk lainnya yang fokus untuk melayani pasar telekomunikasi, perbankan serta memberikan solusi pelayanan aplikasi *smart card.*

"Proses akuisisi tersebut sejalan dengan inisiatif Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Peruri 2017—2021 serta merupakan bagian dari restrukturisasi PDS dengan cara mengakuisisi perusahaan yang bergerak di bidang *smart card,*" ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (3/4) .

Cardsindo dinilai memiliki pengalaman, kompetensi, permesinan mutakhir dengan tenaga ahli yang cukup serta memiliki lebih dari 50% pangsa pasar *smart card* domestik. Akuisisi tersebut diharapkan mampu menjadikan PDS menjadi perusahaan penyedia *digital security* yang mumpuni.

Secara global potensi pasar *smart card* masih terbuka untuk dikembangkan. Menurut data dari Americas Market Intelligence, transaksi nontunai pada 2020 diproyeksikan mencapai 725,9 miliar transaksi dengan pertumbuhan rata-rata sejak 2015 hingga 2020 sebesar 10,9%. Di Indonesia kebutuhan *smart card* masih didominasi sektor perbankan.

Menurut data dari Bank Indonesia, jumlah kartu kredit yang beredar sebanyak 17 juta kartu dengan pertumbuhan rata-rata sejak 2010 hingga 2017 sebesar 3%. Adapun, jumlah kartu debit yang beredar sebanyak 154 juta kartu dengan pertumbuhan rata-rata sejak 2010 hingga 2017 sebesar 18%.

Sementara itu, jumlah kartu uang elektronik yang beredar sebanyak 114 juta kartu dengan pertumbuhan rata-rata sejak 2010 hingga 2017 sebesar 46%.

KINERJA 2017

Pada perkembangan lain, Perum Peruri mencatatkan kenaikan laba bersih secara signifikan pada 2017, dengan kontributor utama pendapatan dari pencetakan uang kertas dan uang logam NKRI.

Sepanjang 2017, Perum Peruri membukukan laba bersih senilai Rp362,79 miliar, naik 161,6% dibandingkan dengan posisi pada 2016 senilai Rp138,68 miliar. Pendapatan usaha Peruri pada 2017 juga naik menjadi Rp3,48 triliun, tumbuh 44,30% dibandingkan dengan capaian pada 2016 yang mencapai Rp2,41 triliun.

Dwina menambahkan, pendapatan perusahaan dikontribusikan oleh pencetakan uang kertas NKRI sebesar 66,7%, uang logam NKRI 4,5%, paspor dan buku 6,4%, pita cukai 8,3%, meterai 2,8%, dan lainnya 11,3%.

"Pencapaian ini merupakan kerja sama dari seluruh karyawan dan manajemen sebelumnya yang telah menyelesaikan." *(Abdul Rahman)*

CONSTRUCTION & INVESTMENT

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PP (Persero) Tbk

Direksi PT PP (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Sa Tahunan ("**RUPS Tahunan**") Tahun Buku 2017 Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : **Kamis, 26 April 2018**
Waktu : **Pukul 10.00 WIB s.d. selesai**
Tempat : **Auditorium Lantai 1**
Plaza PP - Wisma Subiyanto
Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57
Pasar Rebo, Jakarta 13760

MATA ACARA:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Lap Keuangan Perseroan *Audited* untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan *Audited* untuk Tahun Buku yang berakhir p tanggal 31 Desember 2017;
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
4. Penetapan Tantiem tahun 2017, Gaji dan Honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun 2018;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2018;
6. Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/08/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pedoman Kerja Sama Ba Usaha Milik Negara beserta perubahan-perubahannya;
7. Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
8. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil IPO Tahun 2010 dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas melalui Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMTED) atau *Rights Issue*;
9. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar;
10. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

PENJELASAN MATA ACARA:

Penjelasan Mata Acara ke-1 sampai dengan ke-5

Merupakan Agenda Rutin dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomo Tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Nega

Penjelasan Mata Acara ke-6

Dilaksanakan sehubungan dengan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03/MBU/08/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pedoman Kerja Sama Ba Usaha Milik Negara, yang disebutkan pada Pasal 10 bagi Persero/ Perusahaan Terbatas yang tidak semua sahamnya dimiliki oleh negara, pemberlakuan Peraturan Me ini dilakukan melalui adopsi secara langsung oleh Direksi atau melalui adopsi dengan penyesuaian oleh Direksi atau pengukuhan dalam RUPS Persero/ Perusah Terbatas yang bersangkutan.

Penjelasan Mata Acara ke-7

Sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-11/MBU/09/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/06/2 tanggal 03 Juni 2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara kepada BUMN dan Perseroan Terba Pertanggungjawaban realisasi penggunaan tambahan dana PMN pada RUPS dilaksanakan secara berkala setiap tahun bersamaan dengan RUPS Pengesahan Lap Tahunan.

Penjelasan Mata Acara ke-8

Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan OJK Nomor: 30/POJK/04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perusah Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penaw Umum telah direalisasikan.

Penjelasan Mata Acara ke-9

Dalam rangka perubahan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan dengan cara menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan. (1) Kegi investasi dan/atau pengelolaan usaha dibidang prasarana dan sarana dasar (infrastruktur) termasuk jalan tol, industri: (a) pertambangan batubara, oil dan gas ba lainnya, (b) infrastruktur jalan tol, kereta api dan pelabuhan, dan (c) energi dan energi terbarukan; Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; Pengadaan pengelolaan sampah dan daur ulang; serta Pengadaan air, telah tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah dilaksanakan sehari-hari oleh Perseroan. Untu Perseroan bermaksud untuk memindahkan dari kegiatan usaha penunjang menjadi kegiatan usaha utama dan (2) Perubahan standarisasi Anggaran Dasar BUMN Terb terkait batasan kewenangan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, sebagaimana dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan Mata Acara ke-10

Sesuai dengan Pasal 11 ayat 10 dan Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RU dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan ini sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas J Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaran RUPS Perusahaan Terbuka sehingga Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi p Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam RUPS Tahunan adalah para Pemegang Saham yang namanya terc dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada hari **Selasa, 03 April 2018** sampai dengan pukul **16.00 WIB** di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perser PT BSR Indonesia dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada Sub Rekening Efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia ("BEI") pada hari **Selasa, 03 April 2018.**
3. Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dapat diperoleh di perusahaan atau di bank kustodian dimana para Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya.
4. Pemegang Saham Perseroan yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam RUPS Tahunan dengan membawa Surat Kuasa dengan ketentuan anggota Dire anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam RUPS Tahunan ini, namun suara yang mer keluarkan tidak diperhitungkan dalam Pemungutan Suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di Kantor BAE:

PT BSR Indonesia
Kompleks Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No. 10-11
Jl. KH. Hasyim Ashari Jakarta 10150
Telp. +62 21-631 7828 / Faksimili +62 21-631 7827

6. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada hari **Rabu, 25 April 2018** sampai den pukul **16.00 WIB** melalui Kantor BAE PT BSR Indonesia.
   a. Para Pemegang Saham Perseroan atau para Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri RUPS Tahunan dimohon untuk menyerahkan *fotocopy* Kartu Ta Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum mema ruang Rapat.
   b. Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa *fotoc* Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
7. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemeg Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32"), bahan mata acara RUPS Tahunan tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan sampai dengan penyelenggar RUPS Tahunan kecuali untuk materi mata acara Rapat ke-10, sesuai dengan Pasal 15.7.b POJK No. 32 akan tersedia paling lambat pada saat RUPS Tahu diselenggarakan. Bahan mata acara RUPS Tahunan dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemeg Saham Perseroan di alamat sebagai berikut:

PT PP (Persero) Tbk
Plaza PP – Wisma Subiyanto
Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo Jakarta 13760
Telp. +62 21-877 84137 / Faksimili +62 21-877 84136

8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS Tahunan, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk h di tempat acara selambat-lambatnya 30 *(tiga puluh)* menit sebelum RUPS Tahunan dimulai.

Jakarta, 04 April 2018
PT PP (Persero) Tbk
Direksi

www.pt-pp.com

batasan penempatan pada Surat Berharga Negara, seperti POJK Nomor 1 Tahun 2016, POJK 36 Tahun 2016 dan POJK 56 Tahun 2017.

Dia menyebutkan, total dana yang dikelola BPJSTK saat ini mencapai Rp 324,9 triliun. Adapun rincian aset alokasinya yakni penempatan di deposito (10%), surat utang (60%), saham (19%), reksa dana (10%), dan investasi langsung (1%). Dana kelolaan tersebut diinvestasikan pada berbagai segmentasi sektor, seperti sektor keuangan, pertambangan, aneka industri, transportasi, dan infrastruktur.

Segmentasi penempatan pengelolaan *compliance* yang komprehensif. Namun peserta juga harus memahami, hasil pengembangan dapat fluktuatif sesuai dengan kondisi pasar," jelas Utoh.

Untungkan Pekerja

Sementara itu, pengamat jaminan sosial Hotbonar Sinaga menilai imbal hasil yang diberikan oleh BPJSTK tersebut sangat menguntungkan pekerja. Dia pun mengapresiasi kinerja direksi BPJSTK saat ini karena mampu meningkatkan hasil investasi mencapai Rp 6,68 triliun pada periode Februari 2018. Menurut dia, dalam melakukan investasi BPJSTK terikat pada aturan yang

LPDB-KUMKM Salurkan Dana Bergulir Pola Baru

JAKARTA – Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) mulai menyalurkan dana bergulir dengan pola baru, yang melibatkan lembaga penjaminan sebagai pihak yang pertama menganalisis kelayakan proposal. Lembaga penjaminan tersebut adalah Jamkrindo dan Jamkrida.

Dirut LPDB-KUMKM Braman Setyo dalam Rakor Pengalihan Dana Bergulir Serta Sosialisasi dan Bimtek Program Inklusif LPDB-KUMKM tahun 2018, di Surabaya, pada 27 Maret 2018, mengatakan, hal tersebut adalah jawaban dari berbagai pertanyaan selama ini, bagaimana sebenarnya paradigma baru yang dibangun dimana pihaknya membangun kolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi didukung dinas kab/kota, Jamkrindo, dan Jamkrida.

"Ini menjawab ada sorotan masyarakat bahwa kami lamban dalam menyalurkan. Saya kira kami tidak lamban, kami lagi proses semuanya ini. Regulasi yang kami bangun sekarang adalah bentuk penyederhanaan dari persyaratan yang lalu," kata Braman dalam keterangan resmi yang diterima *Investor Daily*.

Pada kesempatan itu, Braman menyerahkan secara simbolis dana bergulir kepada dua mitra dengan total Rp 13,5 miliar. Dia menegaskan, penyaluran dana bergulir kepada dua mitra itu menjadi awal dimulainya akselerasi/percepatan pencapaian penyaluran 2018, dimana ditargetkan sebesar Rp 1,2 triliun. "Kami optimistis pada semester I-2018, sudah bisa tersalurkan 50% dari target, bahkan mungkin sampai akhir tahun bisa melebihi target karena banyaknya permintaan masuk," ujar dia.

Meski banyak permintaan, namun LPDB-KUMKM tidak akan gegabah menyalurkan dana itu, hanya untuk sekedar mencapai target. "Yang lebih penting adalah kolaborasi sistem yang dibangun bersama ini harus ditaati," tegas Braman.

Braman juga menargetkan agar penyaluran dana LPDB KUMKM ini bisa merata di seluruh Indonesia. "Selama ini 70% dana tersalur berkutat di Jawa. Karena itu perlu ada pemerataan dengan harapan dana yang berasal dari APBN ini bisa dinikmati semua wilayah, dan tetap harus diingat dana ini bukanlah charity atau bansos, karena ini dana dari pajak rakyat dan harus dikembalikan ke negara," papar dia.

Sementara itu, Kadinas Koperasi dan UKM Jatim Maspurnomo Hadi menyambut baik pola baru yang diterapkan dalam penyaluran dana bergulir ini. **(ris)**

Stanchart Siapkan Kredit Program Modal Kerja Rp 2,3 T

JAKARTA – Standard Chartered Bank Indonesia (Stanchart Indonesia) menyepakati pemberian komitmen plafon kredit untuk program solusi modal kerja terpadu Rp 2,3 triliun sampai 2 April 2018. Kantor cabang bank asing (KCBA) ini juga telah menggandeng 16 rekanan untuk program tersebut.

Chief Executive Officer (CEO) Stanchart Indonesia Rino Donosepoetro menyatakan, perseroan tengah fokus mengembangkan portofolio kredit segmen usaha kecil dan menegah (UKM) dan ekspor. Hal tersebut sejalan dengan peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 17/12/PBI/2015, yang memuat ketentuan batas minimal penyaluran kredit bank ke segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Sebagai strategi ketentuan BI, sejak 2016 kami meluncurkan program solusi modal kerja terpadu. Sampai kemarin (2 April 2018), komitmen plafon yang kami berikan terhadap 16 rekanan program tersebut mencapai Rp 2,3 triliun," ujar Rino di Jakarta, Senin (2/4).

Pada akhir 2017 Stanchart Indonesia membukukan kontribusi kredit UKM, dan ekspor 15,22% terhadap total kredit Rp 27,55 triliun. Sebagai KCBA, Stanchart Indonesia dapat memasukan portofolio outstanding kredit ekspor dalam batas minimal penyaluran kredit UMKM sesuai ketentuan BI.

Meski demikian, Rino menegaskan, perusahaan tetap berkomitmen menumbuhkan kredit segmen UKM. Hal tersebut yang menjadi latar belakang Stanchart Indonesia meluncurkan program solusi modal kerja terpadu. Melalui program yang hanya menggunakan *invoice* tagihan sebagai *underlying* pinjaman itu, KCBA ini memberikan kredit kepada beberapa *supplier, vendor,* dan distributor dari 16 rekanan yang digandeng.

Rino menegaskan, mayoritas *supplier, vendor,* dan distributor tersebut merupakan perusahaan UKM. Sementara 16 rekanan dari Stanchart Indonesia untuk program solusi modal kerja terpadu, meliputi perusahaan ritel, *fast moving consumer goods* (FMCG), dan perusahaan logistik.

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, yang memegang brand Alfamart, merupakan satu dari 16 rekanan program solusi modal kerja terpadu Stanchart Indonesia. Dalam konferensi pers kerja sama kedua perusahaan, *Head of Cash Management and Banks* Stanchart Indonesia Rolly A Lahagu menjelaskan, Stanchart Indonesia menyiapkan komitmen plafon Rp 350 miliar untuk *supplier* dari Sumber Alfaria Trijaya.

Rino menambahkan, plafon Rp 350 miliar kepada Sumber Alfaria Trijaya, sudah termasuk dalam total komitmen kredit Rp 2,3 triliun untuk program solusi modal kerja terpadu. "Jika sebelumnya 15 rekanan kami memikiki 500 *supplier, vendor,* atau distributor, kini Stanchart Indonesia mendapatkan tambahan kisaran 400 supplier dari Sumber Alfaria Trijaya, yang dapat diberikan kredit," tegas Rino. **(dka)**

CONSTRUCTION & INVESTMENT

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PP (Persero) Tbk

Direksi PT PP (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum P
("**RUPS Tahunan**") Tahun Buku 2017 Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : **Kamis, 26 April 2018**
Waktu : **Pukul 10.00 WIB s.d. selesai**
Tempat : **Auditorium Lantai 1**
Plaza PP - Wisma Subiyanto
Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57
Pasar Rebo, Jakarta 13760

MATA ACARA:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta penge Perseroan *Audited* untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan *Audited* untuk Tahun I tanggal 31 Desember 2017;
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
4. Penetapan Tantiem tahun 2017, Gaji dan Honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan t
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Pro Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2018;
6. Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/08/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pedoman Kerj Negara beserta perubahan-perubahannya;
7. Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
8. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil IPO Tahun 2010 dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas Terlebih Dahulu (HMTED) atau *Rights Issue*;
9. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar;
10. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

PENJELASAN MATA ACARA:

Penjelasan Mata Acara ke-1 sampai dengan ke-5

Merupakan Agenda Rutin dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Unda tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negar

Penjelasan Mata Acara ke-6

Dilaksanakan sehubungan dengan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03/MBU/08/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pedoman Kerj Negara, yang disebutkan pada Pasal 10 bagi Persero/ Perusahaan Terbatas yang tidak semua sahamnya dimiliki oleh negara, pemberlakuan Peraturan M adopsi secara langsung oleh Direksi atau melalui adopsi dengan penyesuaian oleh Direksi atau pengukuhan dalam RUPS Persero/ Perusahaan Terbatas y

Penjelasan Mata Acara ke-7

Sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-11/MBU/09/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER 03 Juni 2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara kepada BUMN dan Perseroan Terbatas. Per penggunaan tambahan dana PMN pada RUPS dilaksanakan secara berkala setiap tahun bersamaan dengan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan.

Penjelasan Mata Acara ke-8

Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan OJK Nomor: 30/POJK/04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran

Penjelasan Mata Acara ke-9

Dalam rangka perubahan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan dengan cara menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perser dan/atau pengelolaan usaha dibidang prasarana dan sarana dasar (infrastruktur) termasuk jalan tol, industri: (a) pertambangan batubara, oil dan gas batu jalan tol, kereta api dan pelabuhan, dan (c) energi dan energi terbarukan; Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; Pengadaan air, pengelola serta Pengadaan air, telah tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah dilaksanakan sehari-hari oleh Perseroan. Untuk itu Perseroan bermaksu kegiatan usaha penunjang menjadi kegiatan usaha utama dan (2) Perubahan standarisasi Anggaran Dasar BUMN Terbuka terkait batasan kewenangan Dire Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, sebagaimana dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan Mata Acara ke-10

Sesuai dengan Pasal 11 ayat 10 dan Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhe dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan ini sudah sesuai dengan ketentuan Peratura No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaran RUPS Perusahaan Terbuka sehingga Panggilan ini merupakan undangan resmi ba Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam RUPS Tahunan adalah para Pemegang Saham yang nam Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada hari **Selasa, 03 April 2018** sampai dengan pukul **16.00 WIB** di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan P pemilik saldo saham Perseroan pada Sub Rekening Efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan di Bursa Efek I **Selasa, 03 April 2018.**
3. Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dapat diperole di bank kustodian dimana para Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya.
4. Pemegang Saham Perseroan yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam RUPS Tahunan dengan membawa Surat Kuasa dengan ketentua Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam RUPS Tahunan ini, namun suara ya diperhitungkan dalam Pemungutan Suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di Kantor BAE:

   PT BSR Indonesia
   Kompleks Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No. 10-11
   Jl. KH. Hasyim Ashari Jakarta 10150
   Telp. +62 21-681 7828 / Faksimili +62 21-631 7827

6. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada hari **Rabu, 25 April 2018** sampa melalui Kantor BAE PT BSR Indonesia.
   a. Para Pemegang Saham Perseroan atau para Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri RUPS Tahunan dimohon untuk menyerahkan *fotoco* (KTP) atau tanda pengenal lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasu
   b. Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar me Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
7. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32"), bahan mata acara RUPS Tahunan tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan sampai dengan penyele kecuali untuk materi mata acara Rapat ke-10, sesuai dengan Pasal 15.7.b POJK No. 32 akan tersedia paling lambat pada saat RUPS Tahunan diselengg RUPS Tahunan dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan di a

   PT PP (Persero) Tbk
   Plaza PP – Wisma Subiyanto
   Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo Jakarta 13760
   Telp. +62 21-877 84137 / Faksimili +62 21-877 84136

8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS Tahunan, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat selambat-lambatnya 30 *(tiga puluh)* menit sebelum RUPS Tahunan dimulai.

Jakarta, 04 April 2018
PT PP (Persero) Tbk
Direksi

www.pt-pp.com

Di periode Januari-Maret 2018, harga timah kontrak tiga bulanan di LME berhasil menguat 5,37% jadi US$ 21.100 per metrik ton. Sedangkan harga nikel di akhir kuartal satu lalu mencapai US$ 13.300 per metrik ton, naik 4,23% dibanding akhir 2017 lalu.

Bagaimana prospek pergerakan harga komoditas logam industri ini? Berikut ulasan para analis terhadap prospek komoditas ini.

Aluminium

Di awal tahun, aluminium masih berada dalam tren *bullish*. Tetapi, seiring adanya dalam. Selain itu, membaiknya data-data ekonomi China bisa menjadi sentimen positif bagi komoditas ini dalam jangka panjang.

Ibrahim memprediksi harga aluminium akan bergerak di kisaran US$ 2.000–US$ 2.200 per metrik ton pada kuartal kedua tahun ini.

Tembaga

Serupa dengan aluminium, tembaga pun terkena dampak dari perang dagang antara AS dengan China. Harga tembaga merosot lantaran perang dagang juga merugikan negara-negara berkembang yang

Prediksi Rupiah

Masih Perang Dagang

JAKARTA. Nilai tukar rupiah masih bergerak stagnan cenderung tertekan. Kemarin, kurs spot rupiah ditutup melemah tipis 0,08% ke level Rp 13.764 per dollar AS. Sementara kurs rupiah di Jakarta Inderbank Spot Dollar Rate (JISDOR) terkoreksi 0,11% ke posisi Rp 13.765 per dollar AS.

Rencana China memberlakukan tarif impor atas 128 produk asal Amerika Serikat (AS) menjadi penopang pelemahan mata uang Garuda. Analis Valbury Asia Futures Lukman Leong mengatakan, potensi perang dagang ini memicu kekhawatiran di beberapa negara, seperti Australia dan Indonesia, yang merupakan mitra dagang utama China.

Sementara itu, dari dalam negeri belum ada sentimen lain yang bisa mendorong nilai tukar rupiah bergerak menguat. Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menambahkan, pelaku pasar kini masih menanti pengumuman angka cadangan devisa Indonesia. Harapannya, sentimen cadangan devisa dapat menggerakkan pasar dan membuat rupiah kembali perkasa.

Sementara dari eksternal, pelaku pasar masih menanti pengumuman indeks belanja sektor manufaktur di Eropa serta perkembangan perseteruan dagang antara AS dan China. "Selain itu perlu diperhatikan kondisi di bursa AS," kata David, Selasa (3/4).

Dalam perhitungan David, hari ini rupiah akan bergerak dalam kisaran Rp 13.730–Rp 13.870 per dollar AS. Sedangkan Lukman memprediksi, nilai tukar nilai tukar mata uang Garuda hari ini akan bergerak dalam rentang Rp 13.750–Rp 13.800 per dollar AS.

Putri Werdiningsih

Harga Komoditas Harian
(12/1/2018-19/1/2018)

Sumber: Logam Mulia, Bloomberg Keterangan:

Minyak Mentah
63,01 | 63,33
0,51%
Pengiriman Mei 2018
Minyak WTI di Bursa NYMEX-AS
(Dollar AS per barel)

Batubara
90,90 | 91,70
0,88%
Pengiriman Mei 2018
Batubara Newcastle di Bursa ICE
(Dollar AS per ton)

CPO (MDEX)
634,81 | 629,26
-0,87%
Pengiriman Juni 2018
Bursa Derivatif Malaysia (MDEX)
(Dollar AS per ton)

Emas Berjangka
1.346,90 | 1.344,10
-0,21%
Pengiriman Juni 2018
Divisi Comex Bursa NYMEX-AS
(Dollar AS per ons troi)

CPO (ICDX)
8.960 | 8.965
0,06%
Pengiriman Juni 2018
Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia
(ICDX) (Rupiah per Kilogram)

Emas Batangan
648.000 | 654.000
0,93%
Divisi Logam Mulia-PT Antam Tbk
Emas batangan seberat 1 gram
(Rupiah per gram)

CONSTRUCTION & INVESTMENT

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PP (Persero) Tbk

Direksi PT PP (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang ("**RUPS Tahunan**") Tahun Buku 2017 Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : **Kamis, 26 April 2018**
Waktu : **Pukul 10.00 WIB s.d. selesai**
Tempat : **Auditorium Lantai 1**
Plaza PP - Wisma Subiyanto
Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57
Pasar Rebo, Jakarta 13760

MATA ACARA:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan L Perseroan *Audited* untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan *Audited* untuk Tahun Buku ya tanggal 31 Desember 2017;
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
4. Penetapan Tantiem tahun 2017, Gaji dan Honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun 20
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Ke Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2018;
6. Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/08/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pedoman Kerja Sama Negara beserta perubahan-perubahannya;
7. Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
8. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil IPO Tahun 2010 dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas melalui H Terlebih Dahulu (HMTED) atau *Rights Issue*;
9. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar;
10. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

PENJELASAN MATA ACARA:

Penjelasan Mata Acara ke-1 sampai dengan ke-5

Merupakan Agenda Rutin dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nom tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Penjelasan Mata Acara ke-6

Dilaksanakan sehubungan dengan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03/MBU/08/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pedoman Kerja Sama Negara, yang disebutkan pada Pasal 10 bagi Persero/ Perusahaan Terbatas yang tidak semua sahamnya dimiliki oleh negara, pemberlakuan Peraturan Menteri in adopsi secara langsung oleh Direksi atau melalui adopsi dengan penyesuaian oleh Direksi atau pengukuhan dalam RUPS Persero/ Perusahaan Terbatas yang bers

Penjelasan Mata Acara ke-7

Sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-11/MBU/09/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MB 03 Juni 2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara kepada BUMN dan Perseroan Terbatas. Pertanggun penggunaan tambahan dana PMN pada RUPS dilaksanakan secara berkala setiap tahun bersamaan dengan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan.

Penjelasan Mata Acara ke-8

Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan OJK Nomor: 30/POJK/04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perusah mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum te

Penjelasan Mata Acara ke-9

Dalam rangka perubahan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan dengan cara menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan. (1) dan/atau pengelolaan usaha dibidang prasarana dan sarana dasar (infrastruktur) termasuk jalan tol, industri: (a) pertambangan batubara, oil dan gas batuan lainny jalan tol, kereta api dan pelabuhan, dan (c) energi dan energi terbarukan; Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; Pengadaan air, pengelolaan samp serta Pengadaan air, telah tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah dilaksanakan sehari-hari oleh Perseroan. Untuk itu Perseroan bermaksud untuk kegiatan usaha penunjang menjadi kegiatan usaha utama dan (2) Perubahan standarisasi Anggaran Dasar BUMN Terbuka terkait batasan kewenangan Direksi, Dew Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, sebagaimana dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan Mata Acara ke-10

Sesuai dengan Pasal 11 ayat 10 dan Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan ol dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan ini sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otorit No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaran RUPS Perusahaan Terbuka sehingga Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para P Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam RUPS Tahunan adalah para Pemegang Saham yang namanya ter Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada hari **Selasa, 03 April 2018** sampai dengan pukul **16.00 WIB** di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan PT BSR I pemilik saldo saham Perseroan pada Sub Rekening Efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesi **Selasa, 03 April 2018.**
3. Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dapat diperoleh di peru di bank kustodian dimana para Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya.
4. Pemegang Saham Perseroan yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam RUPS Tahunan dengan membawa Surat Kuasa dengan ketentuan anggot Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam RUPS Tahunan ini, namun suara yang merel diperhitungkan dalam Pemungutan Suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di Kantor BAE:

PT BSR Indonesia
Kompleks Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No. 10-11
Jl. KH. Hasyim Ashari Jakarta 10150
Telp. +62 21-631 7828 / Faksimili +62 21-631 7827

6. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada hari **Rabu, 25 April 2018** sampai dengan melalui Kantor BAE PT BSR Indonesia.
   a. Para Pemegang Saham Perseroan atau para Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri RUPS Tahunan dimohon untuk menyerahkan *fotocopy* Kartu (KTP) atau tanda pengenal lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang
   b. Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa A Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
7. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum P Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32"), bahan mata acara RUPS Tahunan tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan sampai dengan penyelenggaraa kecuali untuk materi mata acara Rapat ke-10, sesuai dengan Pasal 15.7.b POJK No. 32 akan tersedia paling lambat pada saat RUPS Tahunan diselenggarakan. RUPS Tahunan dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan di alamat se

PT PP (Persero) Tbk
Plaza PP – Wisma Subiyanto
Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo Jakarta 13760
Telp. +62 21-877 84137 / Faksimili +62 21-877 84136

8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS Tahunan, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk ha selambat-lambatnya 30 *(tiga puluh)* menit sebelum RUPS Tahunan dimulai.

Jakarta, 04 April 2018
PT PP (Persero) Tbk
Direksi

www.pt-pp.com